

Pelatihan Persiapan Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum Penempatan hingga Pemulangan di Desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Suwarti Sari, Mariane Delanova, Taufan Herdiansyah Akbar

Jurusan Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Penulis korespondensi : taufan.akbar@lecture.unjani.ac.id

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pemahaman kepada para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja keluar negeri. Pembekalan yang diberikan meliputi pengetahuan tentang hak dan kewajiban, keterampilan dasar bahasa asing, dan prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan apabila mendapatkan kesulitan dan persoalan yang terkait hukum di negara tempat mereka bekerja. Kegiatan dilakukan melalui diskusi, pelatihan, dan seminar. Kegiatan pengabdian masyarakat bekerjasama dengan pihak kantor desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa peningkatan pengetahuan para calon PMI mengenai hak dan kewajiban yang mereka miliki selama bekerja di luar negeri, memiliki pemahaman yang cukup mengenai situasi negara lain yang berbeda dari segi sosial, budaya dan ekonomi dari Indonesia. Para calon PMI juga memiliki pengetahuan mengenai tata cara dan mekanisme yang harus mereka tempuh jika memerlukan bantuan dari perwakilan Indonesia di luar negeri. Para calon PMI juga memiliki kesadaran untuk memiliki dokumen yang lengkap dan menempuh jalur legal untuk bekerja di luar negeri. Oleh sebab itu, hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan pembekalan substansi yang baik bagi para calon PMI.

Kata kunci: Pekerja Migran, pemberdayaan masyarakat, hak dan kewajiban pekerja migran.

Abstract: The community service activity is aiming to provide briefing and understanding to prospective Indonesian Migrant Workers (IMW) who will work abroad. The briefing provided includes knowledge of rights and obligations, basic foreign language skills, and procedures and mechanisms that must be carried out when faced with difficulties and problems related to law in the country where they work. Activities are carried out through discussions, training, and seminars. Community service activities in collaboration with the Desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. The results of community service activities are increasing the knowledge of IMW prospective regarding the rights and obligations they have while working abroad, having sufficient understanding of the situation of other countries that are different from the social, cultural and economic aspects of Indonesia. IMW prospective also have knowledge of the procedures and mechanisms that they must follow if they need assistance from Indonesian representatives abroad. IMW prospective also have the awareness

to have complete documents and take the legal route to work abroad. Therefore, the result of this community service activity is community empowerment by providing a proper preparation for IMW prospective.

Keywords: *community empowerment, migrant worker, right and obligations of migrant worker.*

1. Pendahuluan

Globalisasi dan modernisasi memunculkan fenomena peningkatan mobilitas manusia melalui migrasi. Orang yang melakukan migrasi sebagai buruh migran (di Indonesia dikenal dengan sebutan TKI) yang bekerja dalam sektor formal maupun informal (ILO, 2019). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah istilah untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri.

Indonesia menghadapi persoalan tersendiri di dalam negeri, yaitu mengenai pertumbuhan penduduk yang pesat, tetapi tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan kerja. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, berimbas pada tidak terkendalinya jumlah pengangguran. Pengangguran sampai saat ini masih menjadi masalah krusial pemerintah Indonesia. Tak dapat dipungkiri, masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan Pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan dan *skill* yang minim, para pencari kerja ini harus saling berkompetisi dengan yang lain. Sementara ketersediaan lapangan kerja terbatas, upah kerja rendah dan kurangnya jaminan kesejahteraan menambah kompleksitas masalah ketenagakerjaan dalam negeri.

Selain persoalan lapangan pekerjaan, ada juga persoalan lain yang disebabkan oleh faktor faktor alam, di mana daerah yang ditempati tidak mendukung untuk dijadikan sumber mata pencaharian. Di Indonesia persoalan di dalam negeri juga berupa tidak meratanya pembangunan dan kemakmuran atau kesejahteraan di antara wilayah Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi dan perpindahan tenaga kerja antar negara. Upaya Pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran adalah dengan melaksanakan program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Peranan Pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

Pengiriman PMI keluar negeri telah berlangsung sebelum berdirinya Republik Indonesia. Pada Tahun 1890, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan jumlah 32.986 orang yang berasal dari pulau Jawa (Amry, 2012). Kegiatan pengiriman PMI ini terus berlangsung hingga saat ini ke berbagai negara salah satunya Malaysia. Malaysia merupakan negara tujuan utama dari para TKI asal Indonesia. Hal yang menyebabkan Malaysia menjadi primadona bagi para TKI adalah karena kedekatan geografis antara Indonesia dengan Malaysia, Malaysia terletak tidak terlalu jauh dari Indonesia karena Malaysia berbatasan langsung dan merupakan negara tetangga terdekat dengan Indonesia, ini menjadi alasan utama para TKI untuk bekerja di Malaysia. Selain itu, budaya dan bahasa Melayu serta iklim tropis yang tak jauh berbeda dengan Indonesia, memudahkan proses adaptasi TKI (Wijaya, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang tenaga kerja yang terbesar di dunia (Damayanti, 2018). Setiap tahun, penduduk Indonesia memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri, inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pemasok pekerja migran terbesar di dunia (Praditya, 2019). Sampai dengan tahun 2012 jumlah pekerja migran mencapai 4 juta jiwa dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Pekerja Migran Indonesia ini diberi gelar sebagai pahlawan devisa karena berdasarkan data *World Bank*, devisa negara yang dihasilkan dari PMI/TKI di luar negeri signifikan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, Indonesia menerima lebih kurang USD 27 juta dari tahun 2010 hingga 2013 dari para PMI (Bank Indonesia, 2013). Negara-negara tujuan para TKI pada umumnya adalah negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur juga Timur Tengah di mana Malaysia menjadi tujuan utama para TKI. Tabel 1 menunjukkan penempatan TKI berdasarkan negara penerima (BNP2TKI, 2015). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa lebih kurang sekitar 63% TKI memilih Malaysia sebagai negara tujuan untuk bekerja di luar negeri, ini menjadikan Malaysia sebagai negara favorit TKI untuk bekerja. Akan tetapi, ada persoalan yang menyertai para TKI yang ingin bekerja di Malaysia, yaitu ketika TKI yang berangkat ke Malaysia menempuh jalur ilegal. Jalur ilegal ditempuh oleh para TKI karena jalur tersebut dianggap lebih mudah dan cepat dibandingkan jalur legal yang membutuhkan banyak persyaratan ketat yang harus dipenuhi seperti keterampilan (*skill*), belum lagi jalur legal memiliki kuota yang terbatas. Para TKI cenderung lebih memilih jalur ilegal daripada jalur legal meskipun jalur tersebut ternyata membawa dampak negatif kepada para TKI. Banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh

para TKI yang bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal. Tabel 2 memperlihatkan jumlah pengaduan TKI berdasarkan jenis masalahnya.

Tabel 1. Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Tahun 2014 s.d. 2018 (BNP2TKI, 2019)

No.	Negara	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah TKI Per-Negara
1.	Malaysia	127.870	97.748	87.623	88.891	90.671	492.803
2.	Taiwan	82.665	75.304	77.087	62.823	72.373	370.252
3.	Hongkong	35.050	15.322	14.434	69.182	73.917	207.905
4.	Saudi Arabia	44.325	23.000	13.538	6.471	5.894	93.228
5.	Singapura	31.680	20.895	17.700	13.379	18.324	101.978
6.	Thailand	717	90	6	6	11	830
7.	Brunei Darussalam	11.616	9.993	8.152	6.623	5.707	42.091
	Jumlah Total TKI dari 2014-2018	333.923	242.352	218.540	247.375	266.897	1.309.087

Tabel 2. Jumlah Pengaduan TKI Berdasarkan Jenis Masalah (BNP2TKI, 2019)

No.	Jenis Masalah	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1.	TKI tidak berdokumen	81	133	373	441	1028
2.	TKI dalam tahanan/proses	46	57	57	59	219
3.	Pemalsuan dokumen	43	25	26	10	104
4.	Ilegal rekrut calon TKI	37	100	59	27	223

Berdasarkan tabel 2, terdapat data mengenai jenis masalah yang paling dominan ditemui oleh para TKI adalah TKI tidak berdokumen dibandingkan kasus lainnya. TKI yang bekerja di Malaysia banyak yang bekerja di Johor Bahru yang merupakan negeri bagian Malaysia. Banyak TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit yang berusia sekitar 18-45 tahun.

PMI yang dikirimkan Indonesia ke luar negeri harus dilindungi hak-haknya agar mendapat pelayanan yang maksimal. Akan tetapi, perlindungan hukum bagi para PMI/TKI kini masih lemah. Hal ini menyebabkan PMI rentan mengalami tindak kekerasan, eksploitasi pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan orang dan segala macam bentuk kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan di tiap-tiap tahap perjalanan migrasi, bahkan sampai terancam

hukuman mati. Menurut data Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) jumlah kasus kekerasan yang dialami TKI hingga tahun 2018 sebanyak 3.069 kasus.

Banyaknya persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh para PMI di luar negeri menuntut kesiapan mental PMI sejak keberangkatan mereka ke luar negeri hingga kembali lagi ke tanah air. Hal ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh para TKI kita. Jika dilihat pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya Malaysia selalu menuai kasus setiap tahunnya dan PMI menjadi pihak yang seringkali dirugikan setiap kali ada masalah.

Setelah melihat data dan beberapa kasus yang terjadi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), maka tim Pengabdian Masyarakat dari Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (HI FISIP Unjani) peduli akan keselamatan PMI dari sebelum penempatan hingga pemulangan. Oleh sebab itu, Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020 akan difokuskan untuk melakukan pembekalan, pelatihan dan pendampingan kepada calon PMI agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai PMI/TKI, sehingga dapat memahami apabila mereka mendapatkan kesulitan atau masalah ketika sedang bekerja di luar negeri. Warga desa Nanggalamekar banyak yang memilih untuk menjadi PMI dan bekerja di luar negeri. Akan tetapi, masih banyak calon PMI yang belum memahami hak dan kewajiban mereka, belum memiliki pemahaman mengenai situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya di negara lain (sebagai contoh Malaysia, Singapura dan Timur Tengah) yang berbeda dengan Indonesia. Oleh sebab itu, tim pengabdian masyarakat Jurusan Ilmu Hubungan Internasional memilih untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai pembekalan kepada para calon PMI yang berasal dari desa Nanggalamekar agar mereka dapat memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup untuk menjadi bekal dan pegangan mereka bekerja di luar negeri.

Setelah diberikan pembekalan materi, para calon PMI memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup baik, terutama mengenai hak dan kewajiban mereka, wawasan mengenai kondisi sosial, budaya dan ekonomi negara tujuan bekerja dan prosedur serta tata cara yang harus ditempuh oleh mereka ketika terkena persoalan dan membutuhkan bantuan dari perwakilan Indonesia di luar negeri.

2. Metode

Metode yang ditempuh dalam mencapai pemberdayaan para calon PMI adalah dengan melakukan *Focus Group Discussion*, pelatihan dan seminar. Kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan pihak kantor desa Nanggalamekar di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari pengumpulan data, pemilihan metode kegiatan, sampai dengan pelaksanaan seminar.

3. Hasil dan Diskusi

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan melakukan *focus group discussion* dengan para calon PMI, pelatihan untuk para calon PMI dan seminar yang dihadiri oleh para calon PMI. Pelaksanaan pelatihan dan pembekalan terhadap masyarakat desa Nanggalamekar terutama para calon PMI dilakukan dengan bekerjasama dengan kantor desa Nanggalamekar mulai dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2020. Peserta pelatihan calon PMI yang akan menunggu keberangkatan untuk bekerja di luar negeri dan mantan PMI yang sudah kembali ke Indonesia. Hal ini dilakukan untuk sesi diskusi dan *sharing* pengalaman para mantan PMI dan pemberian wawasan kepada calon PMI berdasarkan pengalaman para PMI yang sudah kembali ke desanya.

Sebelum melakukan pelatihan dilakukan serangkaian sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat/peserta terkait dengan pemahaman PMI dan kesadaran akan hak dan kewajiban para PMI selama bekerja di luar negeri. Selain itu, dilakukan juga serangkaian diskusi untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman para calon PMI mengenai kondisi negara yang akan didatangi oleh mereka untuk bekerja, di mana sebagian besar PMI memiliki negara favorit untuk bekerja di luar negeri, seperti di Malaysia, Arab Saudi (Timur Tengah) dan Singapura.

Beberapa diskusi kemudian dilaksanakan untuk membandingkan dengan hasil diskusi sebelumnya, di mana materi dalam diskusi tersebut terkait dengan :

1. Pemahaman terhadap situasi dan kondisi yang akan para PMI hadapi ketika bekerja di luar negeri atau di negara lain.
2. Pemahaman mengenai kesadaran bahwa mereka memiliki hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan maupun rumah tangga tempat mereka bekerja, seperti mendapat upah yang layak dan rutin setiap bulan yang besarnya menyesuaikan dengan aturan di negara tempat mereka bekerja.

3. Pemahaman mengenai kewajiban PMI, yaitu memiliki dokumen yang lengkap, menjaga dengan baik dokumen tersebut jangan sampai hilang dan memilih jalur keberangkatan sesuai dengan prosedur hukum (legal).

4. Pemahaman dan pengetahuan mengenai bahasa Inggris dasar, sehari-hari yang akan diperlukan ketika PMI bekerja di luar negeri .

5. Pelatihan mengenai keterampilan bahasa Inggris dasar dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya negara-negara yang dituju, yaitu Malaysia, Singapura dan Arab yang tentu berbeda kondisi sosial, ekonomi dan budaya dengan Indonesia.

Selanjutnya secara umum materi yang disampaikan berkaitan dengan substansi dalam diskusi tersebut, yaitu menyampaikan persoalan mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh calon PMI pada saat keberangkatan, yaitu banyak penyalur tenaga kerja yang menawarkan bekerja di luar negeri tetapi prosedur yang dilakukan tidak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atau ilegal. Materi juga diberikan mengenai perlunya kemampuan dasar bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Materi juga memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban PMI, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka. Materi juga diberikan terkait apabila di negara tempat para PMI bekerja, mereka mendapatkan masalah atau harus berhadapan dengan masalah hukum, maka mereka harus melapor kepada perwakilan RI di negara tersebut. Hasil diskusi ini, memperlihatkan tingkat kesadaran dan pengetahuan peserta terhadap hak dan kewajiban serta wawasan mengenai kondisi sosial, ekonomi dan budaya di negara lain masih kurang. Diskusi dilakukan untuk mengidentifikasi indikator serta stimulus kepada peserta agar memiliki kesadaran, pengetahuan, wawasan dan pemahaman terhadap situasi yang akan dihadapi oleh para calon PMI di luar negeri, hak dan kewajiban, serta mekanisme perlindungan diri yang harus mereka miliki ketika terkena masalah ketika bekerja di luar negeri. Dalam jangka panjang, kesadaran tersebut akan menjadi tugas juga bagi kantor desa Nanggalamekar untuk terus menerus membina masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri, agar mereka dapat berangkat dengan jalur yang legal, sehingga mencegah sulitnya perlindungan yang dilakukan oleh negara apabila PMI berangkat dengan cara ilegal.

Sedangkan materi yang kedua, secara khusus menyampaikan teknis mengenai memilih sponsor atau penyalur yang kredibel, sehingga dapat berangkat dengan dokumen yang lengkap dan dengan cara yang legal sebagai dasar atau langkah awal yang positif bagi masyarakat yang

berminat untuk bekerja ke luar negeri. Hal ini untuk menghindari masih minimnya pengetahuan masyarakat/peserta terhadap tata cara keberangkatan yang benar dan sah secara hukum. Hal ini yang memperkuat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unjani.

Kelemahan yang teridentifikasi diantaranya adalah:

1. Kurang pemahaman dan penguasaan masyarakat/peserta di desa Nanggalamekar mengenai PMI, keberangkatan melalui jalur resmi/legal dan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PMI.

2. Kurang sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat/peserta pada khususnya mengenai sosialisasi perlunya berangkat bekerja ke luar negeri berdasarkan prosedur hukum/legal.

3. Kurang pengetahuan masyarakat/peserta di desa Nanggalamekar mengenai penguasaan bahasa asing, minimal bahasa Inggris.

4. Kurang pengetahuan dan pemahaman mengenai situasi dan kondisi di negara tempat tujuan bekerja di luar negeri, yang tentu berbeda dengan di desanya dan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi positif bagi upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penguasaan terhadap hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dan dimiliki oleh para calon PMI ketika akan bekerja ke luar negeri. Selanjutnya dengan penguasaan dan pemahaman yang harus dipersiapkan oleh calon PMI seperti dokumen yang lengkap dan penguasaan dasar bahasa Inggris, masyarakat/peserta dapat mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dengan menjadi PMI atau ketika bekerja di luar negeri, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat/peserta karena pemasukan dan pendapatan PMI yang akan dikirimkan kembali ke desa Nanggalamekar, sehingga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga para PMI.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil diskusi dan pelatihan yang kemudian dievaluasi dengan melakukan pendampingan, pada khususnya kepada masyarakat desa Nanggalamekar adalah untuk terus berupaya menempuh jalur legal untuk bekerja di luar negeri,

mempersiapkan dokumen yang lengkap, mempersiapkan keterampilan bahasa asing dan keterampilan lain yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri.

Pendampingan dan pelatihan belum dapat menjadi dasar/pijakan mengenai legitimasi dan validitas dari perubahan sikap dan tindakan yang diharapkan agar masyarakat/peserta lebih aktif dan berhati-hati ketika mempersiapkan keberangkatan bekerja ke luar negeri. Keadaan di lapangan atau kondisi sebenarnya setelah pelatihan diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan waspada ketika hendak berangkat bekerja ke luar negeri.

Pelatihan mengenai berbagai aspek terkait PMI ini merupakan langkah awal untuk membentuk masyarakat desa, pada khususnya peserta menjadi masyarakat yang melek akan aspek-aspek penting ketika memutuskan menjadi PMI, sehingga dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan strategis yang diperlukan ketika berangkat bekerja ke luar negeri.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Unjani yang telah memberikan dukungan, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dapat terlaksana. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak Kantor Desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, kepada Bapak Kepala Desa dan Bapak Sekretaris Desa serta kepada segenap masyarakat desa Nanggalamekar yang sudah berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat. Terima kasih kepada para mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Bank Indonesia. 2018. Remitansi TKI Menurut Negara Penempatan. Diakses tanggal 9 Mei 2018 dari laman http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf.
- BNP2TKI. 2019. Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2015. Diakses tanggal 22 Oktober 2019 dari laman <http://portal.bnp2tki.go.id>.
- Damayanti, A.U. 2019. 11 Negara Tujuan TKI, Nomor 4 Negaranya Paling Kecil. Diakses tanggal 28 September 2019 dari laman <https://nasional.okezone.com>.
- Wijaya, C.K. 2018. Upaya BNP2TKI Dalam Menanggulangi *Human Trafficking* TKI di Malaysia Tahun 2010-2013. *Journal of International Relations*, 3(1), 1-8.

- ILO. 2019. Tenaga Kerja Indonesia, internet. Diakses tanggal 10 April 2019 dari laman https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/--ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_145816.pdf.
- Praditya, I.I. 2019. 15 Kota Pemasok TKI Terbanyak Ke Luar Negeri. Diakses tanggal 18 Mei 2019 dari laman www.liputan6.com.
- Amry, K. 2012. Problematika TKI/TKW Indonesia di Luar Negeri. Diakses tanggal 5 November 2015 dari laman amrykelana.blogspot.com.
- Malaysia Labor Laws and Regulations Handbook. 2017. Diakses tanggal 15 Oktober 2019 dari laman <https://books.google.co.id>.
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.